

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM *A'BAGE ASSE'LEE*
PARE' PADA MASYARAKAT DI DESA KAMPALA KECAMATAN
ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Agama
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MARWATI
NIM. 10100115088

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

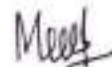
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARWATI
Nim : 10100113037
Tempat /Tgl. Lahir : Kalukuang, 24 Maret 1996
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem *A'bage Asse'lee Pare'* Pada Masyarakat di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem *A'bage Asse'lee Pare'* Pada Masyarakat di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto"** adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 30 Juli 2019

Penyusun



MARWATI

Nim: 10100115088

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM A'BAGE ASSELE PARE PADA MASYARAKAT DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO, yang disusun oleh Marwati, NIM: 10100115088 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Juli 2019 M
21 Zul-qaidah 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Hamsir, S.H., M.Hum.
Munaqisy I : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
Munaqisy II : Dr. H. Supardin, M.H.I.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.
Pembimbing II : Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Maji dan Ibunda Mancio, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari-saudariku yang tercinta: Maryam, Ramli Nur, Rusliadi dan beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian, kejahilan dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang

tak terhitung kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalem dan tak terhitung terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. Supardin M.HI.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekretaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Bapak **Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.** selaku pembimbing I dan Ibu **Dra. Hj. Hartini, M.H.I.** selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas **Syariah** dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
6. Hj. Rosmiati Kr.Lebong selaku Kepala Desa Kampala yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto.
7. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2015 Khususnya **Adinda Ramli, Sitti Nurulawaliah, Mardhiyyah Ulfa, Lisa Aprilyani Sijaya, Reni Andriani Rivai, Nurvina, Nurul Awaliyah, Jernia,** terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini.

8. Special Buat , **ST Hasnah ,Sunarti, Anggi, Suhanir, Irmawati**, yang selalu membantu dan memberi semangat dalam kepada penulis selama penyusunan skripsi.
9. Kepada Senior Angkatan 2013 Khususnya, **Kak Ardi** , yang selalu memberi semangat selama penyusunan skripsi ini;
10. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselasaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga

Samata, 30 Juli 2019

Penulis

MARWATI

Nim: 10100115088

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Pengertian Muzara'ah, Mukhabarh, Musaqah	8
B. Perbedaan Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabara	13
C. Muzara'ah Bersifat Mengikat	13
D. Bentuk dan Jenis Muzara'ah	14
E. Rukun muzara'ah	19
F. Syarat-syarat muzara'ah.....	23
G. Dasar- dasar Muzara'ah Menurut Para Ulama.....	24
H. Zakat Muzara'ah dan Mukhabarah	27
I. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil (muzara'ah).....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Pengumpulan Data	30

D. Metode pengumpulan data	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Metode Pengolahan dan Analisis data	33
BAB IV Hukum Islam Tentang System A'bage Asse'lee Pare'	
Pada Masyarakat Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke	
Kabupaten Jeneponto	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto	34
B. Proses Pelaksanaan Sistem <i>A'bage Assele</i> Menurut Syari'at Pada Masyarakat Desa Kampala	44
C. Dampak Pembagian <i>A'bage Asse'lee</i> di Desa Kampala	50
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil Kepada Petani Penggarap	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik

غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ﺥ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-

Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

NAMA : MARWATI

NIM : 10100115088

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG *A'BAGE ASSELE PARE* PADA MASYARAKAT DI DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO

Skripsi ini membahas bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang *A'bage Assele Pare* pada Masyarakat Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Proses Pelaksanaan Sistem *A'bage Assele* Pada Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, Penerapan bagi hasil (*muzara'ah*) bagi kesejahteraan petani penggarap di Desa Kampala Kec Arungkeke Kab. Jeneponto, Tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem bagi hasil (*muzara'ah*) kepada petani penggarap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai Tinjauan hukum islam terhadap praktek sistem bagi hasil (*muzara'ah*) kepada petani penggarap. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Persuasif, Budaya dan sosiologis*, dan teknik pengumpulan datanya adalah *interview*. *Interview* ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan Petani, Pemilik modal, dan Penggarap.

Namun setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Salah satu bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Kampala adalah si A memberikan tanah kepada si B untuk digarap dengan ketentuan serta prosentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Bentuk bagi hasil antara lain seperdua, sepertiga dan seperempat atau sistem bagi hasil sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk petani penggarap, Tinjauan hukum islam terhadap praktek sistem bagi hasil (*muzara'ah*) Pemberian kebun atau lahan terhadap orang lain seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dapat dikatakan sesuai dengan Syariat Islam.

Implikasi Penelitian dalam skripsi ini adalah menyarankan kepada Petani, Penggarap dan Pemilik Modal agar ketika melakukan kerja sama hendaknya mematuhi aturan yang jelas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut (1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (3) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat (4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹

Manusia adalah merupakan makhluk sosial yang di ciptakan oleh Allah Swt, dalam hidup manusia memerlukan orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dimana dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah di tentukan atau yang digariskan oleh agama.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* Ed , Yogyakarta BPFE, 1978) h. 34

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Swt. Untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak yang sempurna melainkan Allah Swt.²

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paron atau fifty-fifty untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petaniburuh).

Sistem *muzara'ah* ini bias lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewatanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik

Tanah bias memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya.

²Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam Syarah *Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 693.

Sistem *muzara'ah* seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Kampala justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah petani penggarap (petaniburuh) karena terjadi wanprestasi (ingkarjanji) dari pihak pemilik tanah.

Masyarakat Desa Kampala kecamatan Arungkeke kabupaten Jenepono sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat desa Kampala, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam social masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Namun ada satu hubungan yang kurang baik, yaitu pada hubungan kerja yang menyangkut (*A'bageAsse'le*) atau dikenal dengan *Muzara'ah* dalam istilah

Dalam *Al-Mukhabarah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik. Menurut Amir *Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang lain, agar ditanami, dengan perjanjian membagi hasil tanaman itu untuk keduanya, menurut perjanjian yang telah ditentukan

Bagaimanapun juga permasalahan akad muzara'ah antara pemilik tanah dan penggarap yang terjadi di Desa Kampala menarik untuk diteliti. Oleh sebab peneliti tertarik untuk meneliti persoalan akad muzara'ah tersebut dengan menulis skripsi.

Melihat permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM *A'BAGE ASSE'LEE*

PARE' PADA MASYARAKAT DI DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

a. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem *A'bage Assele* Pada Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Peneliti akan berupaya mencari data dan fakta tentang tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem *A'bage Assele* Pada Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto tersebut, selain itu penulis juga mencari bagaimana konsep Sistem *A'bage Assele* tersebut di tinjau dari hukum islam.

b. Deskripsi Fokus

- 1) Tinjauan: Sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tinjauan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tinjauan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan.
- 2) Hukum Islam: Perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan Hukum secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir).
- 3) *Muzara'ah/Mukhâbarah* didefinisikan dengan pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua,

sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar mempermudah dalam pembahasan yang diteliti dan agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan tepat sasaran. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok di atas adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem bagi hasil (*muzara'ah*) kepada petani penggarap, dari masalah pokok dapat dibagi beberapa sub masalah tersebut yakni:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Sistem *A'bage Assele* Pada Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana Dampak pembagian *A'bage Assele* di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem bagi hasil (*muzara'ah*) kepada petani penggarap?

D. Kajian Pustaka

Pertama, Ahmad Azhar Basyir “*Garis-garis Besar Ekonomi Islam*”. Buku ini berisi tentang penjelasan mengenai sistem bagi hasil yang sangat berkaitan dengan karya tulis ini.

Kedua, Prof. Dr. Quraish Shihab 2007 “*Bagi Hasil*”. Buku ini menjelaskan tentang Sistem *Mudharabah* yang sangat berkaitan dengan karya tulis ini.

Selain beberapa buku yang menjadi rujukan penulis juga menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil Garapan antara petani pemilik modal dengan petani penggarap ditinjau dari syari’at Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (tahun2013)”. Skripsi ini menulis tentang bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap.
- b. Skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julobori Kecamatan Palilangga Menurut Hukum Islam (Tahun 2013)”. Skripsi ini menulis tentang bagaimana menurut Hukum Islam tentang Sistem Bagi hasil tersebut.

Namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah bukan tentang sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap ataupun menurut Hukum Islam tentang Sistem Bagi hasil tersebut. Dari hal itulah dasar pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah tentang bagaimana Sistem *A’bage Assele* Pada Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, Apakah adat tersebut sudah sesuai dengan Syari’at Islam atau sebaliknya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Proses pelaksanaan Sistem *A’bage Asse’le* Pada Masyarakat Desa Kampala Kec Arungkeke Kab. Jeneponto

- b. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil (*muzara'ah*) bagi kesejahteraan petani penggarap di Desa Kampala Kec Arungkeke Kab. Jeneponto
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek sistem bagi hasil (*muzara'ah*) kepada petani penggarap

2. Kegunaan

- a. Bagi penulis adalah penulis dapat memberikan gambaran mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek sistem bagi hasil (*muzara'ah*) kepada petani penggarap.
- b. Penulis berharap dalam penelitian dapat memberikan informasi baru kepada pembaca tentang penerapan bagi hasil (*muzara'ah*) bagi kesejahteraan petani penggarap di Desa Kampala Kec Arungkeke Kab. Jeneponto.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Muzara'ah, Mukhabarh, Musaqah

1. Pengertian *muzara'ah* menurut bahasa, *Al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *AL-muzara'ah* yang berarti Tharh *Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*Al-Hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. secara etimologis berasal dari kata dari kata *Az-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan.

Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹ Menurut Afzalur Rahman, mengemukakan bahwa *muzara'ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.²

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah “perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil

¹Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

²Afzalur Rahma, Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II (Cet. III; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 260 – 621.

yang diperoleh dari pengolahan tanah itu”.³ Ahli lain memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebutnya *mukharabah* yakni satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.⁴

Bertitik tolak dari beberapa pandangan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari hasil usaha (kebun/tanah) antara pekerja (petani penggarap) dengan pemodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduksi lahannya, sehingga ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduksi dengan ketentuan bagi hasil atau *mukharabah*. Di sini penulis menegaskan bahwa jika harta berupa tanah dipersewakan dengan sistem mukharabah di sebut dengan *muzara'ah*. Apabila yang dipekerjakan itu berupa kebun maka ia disebut dengan *musaqa*.⁵

2. Pengertian *Mukhabarah* adalah salah satu muamalah yang akadnya memiliki kesamaan dengan *muzara'ah* baik dalam hal dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Keduanya masih sama-sama dalam perdebatan para ulama. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut maka secara syarat baik mukhabarah dan *muzara'ah* boleh dilakukan sepanjang

³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h . 61.

⁴M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* terjemah oleh *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (edisi I; Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1996), h. 8.

⁵M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* , h. 8.

tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan upaya mempekerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya.

Perbedaan antara muamalah yang bersifat *mukhabarah* dan *muzara'ah* terletak dalam hal benih yang akan ditanam apakah benih menjadi tanggungan pemilik tanah atau menjadi tanggungan penggarap. Dan akad *muzara'ah*, pihak penggarap adalah yang menyediakan benih, sedangkan pada akad *mukhabarah*, pemilik tanah adalah pihak yang menyediakan benih.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam akad *mukhabarah*, antara lain:

1. Para akid adalah mereka yang sudah cukup dewasa.
2. Usahakan penggarap adalah seagama.
3. Tanah garapan betul-betul dapat menghasilkan dan menguntungkan.
4. Akad mukhabarah harus jelas, tidak ada keraguan dan kecurangan.

Hikmah yang dapat kita raih dalam melangsungkan akad muamalah yang bersifat *mukhabarah* paling tidak antara lain sebagai berikut :

- a. Membuat peluang kerja.
- b. Mendidik manusia agar lebih memahami tentang ilmu pertanian dan kerja
- c. profesional.
- d. Saling menghargai antara pemilik tanah dan penggarap tanah sangat mulia
- e. dan diridai Allah swt..
- f. Memberi pelajaran agar manusia rajin bekerja.

3. Pengertian *musaqah* secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan yang oleh penduduk Madinah disebut dengan Al-mu'amalah. Secara terminologis fiqh, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan:

“Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat denganketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.”⁶

Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan:

“Mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.”⁷

Dengan demikian, akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad musaqah dibolehkan yang bersumber dari sebuah hadits dari ‘Abdullah ibn ‘Umar yang menyatakan:

“Bahwa Rasulullah SAW. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu.”(HR. al-Jama’ah [mayoritas pakar hadits]).⁸

a. Rukun dan syarat *musaqah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad musaqah adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan jumhur ulama

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h. 243

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.279.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 256.

yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu:

1. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi ;
2. Tanah yang dijadikan obyek musaqah;
3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
4. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah; dan
5. *Shigat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*.⁹

Adapun syarat –syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh), dan berakal.
2. Obyek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah.
3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah.
4. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga, dan sebagainya.
5. Lamanya perjanjian itu harus jelas¹⁰

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 279

¹⁰Nailul Author, "Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabara", *Pendidikan Islam.Com*, 06 Januari 2011. <http://www.pendidikanislam.com/hg/html/> (27 Agustus 2014).

B. Perbedaan *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Muzara'ah sering sekali diidentikan dengan *musaqah* dan *mukhabarah*. Akan tetapi diantaranya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

1. *Musaqah* merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad.
2. Sedangkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarapnya, namun yang dipersoalkan di sini hanya mengenai bibit pertanian itu. *muzara'ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* bibitnya dari petani atau penggarap lahan pertanian itu sendiri yang disertai lahan untuk ia garap.¹¹

C. *Muzara'ah* Bersifat Mengikat

Akad *muzara'ah* bersifat mengikat, menurut ijma, berdasarkan kaidah *luzum* (perikatan) yang diambil dari ayat: penuhilah akad itu QS. Al- Maidah/5:1. Oleh karena itu, akadnya tidak akan gugur kecuali dengan *taqayul* (saling melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan khiyar, atau jika tanah sudah tidak produktif lagi. Akad *muzara'ah* tidak akan gugur dengan kematian salah satu dari kedua pelaku akad, sebagaimana akad- akad lain yang bersifat mengikat.

¹¹Ikhwan, "Islam", *Media islam.Com*, 23 Juni 2010. <http://www.mediaislam/halal/> (18 Juli 2014).

Jika pemilik tanah atau pekerja meninggal, maka ahli warisnya menggantikannya.¹²

D. Bentuk dan Jenis Muzara'ah

Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan, semua pendekatan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia-ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal. Perubahan yang dimaksud di atas adalah adalah peralihan budaya materi menuju budaya Islam dan dapat terwujud dalam kehidupan ekonomi.

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu hak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasul meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan

¹²Jawad, Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), h. 588.

melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah Saw.¹³

Melalui sistem *muzara'ah* atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan *ta'awwun* atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Di dalam fiqih Islam terkenal tiga istilah untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu kebun yang digarap atau diurus dua orang atau lebih, sedang salah satunya merupakan pemilik kebun (tanah). Istilah pertama adalah *musaqah*, kedua adalah *muzara'ah* dan ketiga adalah *mukhabarah*.¹⁴

Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan kebun adalah *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Adapun *musaqah* adalah seorang pemilik kebun menyerahkan pengurusan kebunnya pada seorang tukang kebun atau petani dan bagi hasil.¹⁵ Adapun *muzara'ah* adalah semacam *musaqah* tetapi benih maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan tanaman itu kepunyaan penggarap satu-satunya dari pemilik adalah tanah

¹³Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 270.

¹⁴Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia* (Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1990), h. 284 – 285.

¹⁵Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia*, h. 284.

(kebun)nya.¹⁶ Sedangkan *mukhabarah* adalah semacam *muzara'ah* tetapi benih diusahakan oleh sipemilik tanah, sedang penggarap hanya garapannya saja.¹⁷

Jika dianalisa bentuk ketiga pengolahan tanah di atas, tergambar bahwa bentuk dan jenis sistem bagi hasilpun mengikuti ketiga bentuk pengolahan tanah tersebut. Sebagai contoh, misalnya pengolahan tanah (kebun) menerapkan system *musaqah* di mana pemilik tanah (kebun) bekerja sama segala-galanya dengan penggarap. Artinya bahwa segala hal yang berkenaan pengurusan kebun, baik benih, pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap, maka jenis bagi hasil ini termasuk bentuk *fifty – fifty* (satu-satu) atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun.

Bentuk kedua, yakni sistem *muzara'ah*, di mana benih yang ditanam serta keperluan lainnya berupa pupuk dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi pemilik kebun hanya menanggung lahan (kebunnya), maka hasil produksinya harus dibagi separoh misalnya (sepertiga) $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun dan (duapertiga) $\frac{2}{3}$ untuk penggarap kebun. Dan ketiga adalah bentuk *mukhabarah*, yakni kebalikan dengan sistem *muzara'ah*. Bentuk *mukhabarah* ini segala yang berkenaan dengan kebun dan benihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah dan petani penggarapnya hanya menggarap saja. Maka jenis dan bentuk bagi hasilnya pun hendaknya berbalik, yakni penggarap dapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) dan pemilik kebun mendapat bagian dua pertiga ($\frac{2}{3}$), dan ketiga bentuk dan jenis bagi hasil itupun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik kebun.

¹⁶Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia*, h. 285.

¹⁷Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia*, h. 287.

Untuk situasi umat Islam sepanjang masa dapat ditiru kebolehan persetujuan tersebut mengingat terdapatnya pemilik lahan atau kebun yang tidak punya waktu untuk menggarap kebun atau ladangnya, sebaliknya dipihak lain ada orang yang punya kesempatan luang dan kemampuan untuk mengolah lahan atau ladang tetapi tidak memiliki ladang atau lahan untuk digarapnya. Yang penting bagi keduanya adalah adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya. Hal ini sangat penting agar kedua belah pihak dapat meminimalisir terjadinya persengketaan setelah tiba masanya pembagian hasil produksi pertanian.

Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariasi, yakni sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga bentuk dan jenis pengolahan kebun tersebut adalah terjalinnya kesefahaman atau kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan atau kebun. Hanya saja, Islam menganjurkan agar hasil kesepahaman atau kesepakatan yang telah menjadi perjanjian keduanya hendaknya ditulis agar tidak mudah dilupakan atau dihinati.

Allah berfirman dalam QS AL-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

إِحْدَهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٨﴾

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beirman, apabila kamu bermu’amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya yang mengimplakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksisaksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁸

Ayat di atas mengindikasikan bahwa dalam urusan mu’amalah diboleh melakukan sistem sewa-menyewa, hutang piutang namun harus ditulis dan

¹⁸Departemen Agama RI., *Alqur’an dan Terjemahnya* (Semarang : Toha Putra, 1989), h.70.

disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian yang telah disepakati itu tidak mudah dilupakan, sebab bila seorang lupa, yang lainnya (saksi lain) masih ingat. Jika keterangan singkat di atas dijadikan literan atau ukuran untuk menarik suatu kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk bagi hasil adalah “*musaqah* (saling memberi bagian), *muzara’ah* (saling bantu pertanaman), dan *mukhabarah* (saling beritahukan pertumbuhan kebun)” ataupun sistem baru lagi yang tidak kontradiktif dengan nilai-nilai mu’amalah. Sedangkan jenis-jenis bagi hasilnya adalah *fifty – fifty* (satu-satu) atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun, sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga bagi penggarap lahan karena benih dan lainnya itu ditanggung penggarap dan terakhir sepertiga untuk penggarap lahan dan dua pertiga untuk pemilik lahan, disebabkan segalanya ditanggung pemilik sendiri dan penggarap hanya menggarap saja.

E. Rukun, Syarat-Syarat, Dasar-dasar Muzara’ah

1. Aqidain (dua orang yang bertransaksi,) yaitu pemilik tanah dan
2. Pekerja/penggarap (muzari).
3. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam muzara’ah, meliputi
4. Pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing.
5. Shighah. Muzara’ah dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud (Akad).¹⁹

Adapun syarat-syarat muzara’ah, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus baliq dan

¹⁹ Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia FIQH Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), h. 299.

2. berakal
3. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga
4. benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
5. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a. Menurut adat dikalangan petani, tanah ini boleh digarap dan menghasilkan. Jika
 - b. Tanah ini tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk
 - c. Dijadikan tanah garapan, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
 - d. Batas-batas tanah itu jelas
 - e. Tanah ini diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.
Apabila
 - f. Disyariatkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
6. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c. Pembagian hasil panen ini ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat,
 - d. Sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan
 - e. Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti

- f. Satu kwintal, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh
 - g. Dibawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
7. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak mula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *ijarah* (sewa- menyewa atau upah- mengupah) dengan imbalan sebagai hasilpanen. Oleh sebab itu, jangka waktu ni biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Dan untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *almuzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

Dasar disyaratkan *muzara'ah* adalah hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Salla. Ada beberapa hadish shahih mengenai hal ini, di antaranya adalah hadist dari Abdullah Ibnu *Radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separoh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman.” (H.R. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasai).”

Ibnu Qudamah, pengarang Al-Mughni, mengutip pendapat abu ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib *Rafhiyallahu 'anhum*, dengan upah separuh hasil yang keluar darinya.”Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keluarga mereka hingga sekarang dengan bagian sepertiga, seperempat. Demikian ini tidak ada yang menyangkal sehingga statusnya menjadi *ijma sukuti* (*ijma diam*, yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, sedangkan yang lain tidak memberikan komentar apapun).

Pendapat ini dikutip oleh Ali, Ibnu Mas'ud, Umar ibnu Abdul Aziz, Urwah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Al- Husain, dan lain sebagainya.²⁰

Imam Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “ Tidak ada satu pun di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3 dan 1/4. Abu Hanafia tidak sepakat dengan pendapat diatas. Ia menolak *muzara'ah* berdasarkan argumentasinya seniri. Adapun Imam Malik berpendapat disyariatkannya *muzara'ah* berdasarkan hadist Nabi SAW. jika tanah dalam *muzara'ah* didominasi kurma, yakni kurma lebih banyak dari tanaman lainnya, seperti jika tanaman lain mencapai sepertiga kurma atau lebih sedikit lagi. Imam Syafi'I berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak disyariatkan berdasarkan hadist yang bersumber dari Rafi'I Ibnu Khadij. Namun, sebagian Khathabi memperbolehkannya. Mereka menyatakan bahwa dibolehkan dan telah dipraktekkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri dan tidak ada seorang pun yang membatalkannya.

F. Zakat Muzara'ah dan Mukhabarah

Pada perinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab.

²⁰Muhammad Abdullah dan Ibrahim Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, h. 301.

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil pekerja. Dalam *mukhabarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarap tanahnya kepada orang lain dengan imbalan *seperempat*, *sepertiga*, atau *setengah hasil* sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki

bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai *lima wasaq*: masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.²¹

G. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil (*muzara'ah*)

Allah Swt. menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, termasuk manusia agar semua manusia dapat menikmati buah dan hasilnya. Allahlah yang membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaan-

²¹Yusuf Qardawi, *Fiqh al – Zakat (Hukum Zakat)*, terjemah: Salman Harun (*et al*), (Bogor : Pt. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), cet, ke-3, h. 375.

Nya, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan dan pepohonan. Dia-lah yang memberikan rezeki kepada semua makhlukNya. Dia-lah menciptakan tanah untuk kepentingan makhlukNya yang bernama manusia demi memperoleh kebutuhan hidupnya.

Ketentuan Al-Qur'an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-Qur'an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat.²² Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduktifkan tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 yang dikemukakan oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis bahwa :

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.²³

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (lahan/kebun) apapun bentuknya, baik *muzara'ah*, *mukhabarah* dan

²²M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 77.

²³Charum Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 61.

musaqah harus dilakukan berdasarkan *mukharabah* (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya system kepemilikan tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada yang diwariskan kepada anak-cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sementara dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidak sukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain.

Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang tidak memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau penguasa itu.

Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan digarap sendiri melainkan menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.²⁴

²⁴M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* , h. 102 – 103.

Jika paradigma di atas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena adanya sistem penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasil. Yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana dikutip Afzalur Rahman dalam bukunya "*Economic Doctrines of Islam*" dalam edisi Indonesia bahwa:

Artinya:

"Barangsiapa yang mempunyai tanah, hendaklah mengolahnya sendiri atau memberikannya kepada saudaranya dengan cuma-cuma".²⁵

Dalil di atas, menggambarkan bahwa ajaran-ajaran Islam telah menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang dan persaudaraan di antara sesama muslim dan hasilnya mereka menemukan bahwa tiada ada pengorbanan yang lebih besar selain dari pada pengorbanan demi kepentingan saudara seiman dan sekeyakinan. Salah satu pengorbanan terhadap saudara seiman dan sekeyakinan adalah memberikan tanah milik kita kepada saudara seiman dan sekeyakinan untuk dikelola demi memperoleh hasil yang memuaskan melalui sistem bagi hasil berlandaskan pandangan Islam.

²⁵Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 268.

H. Berakhirnya Muzara'ah

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal berikut:

1. Pekerja melarikan diri

Dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.

2. Pekerja tidak mampu bekerja

Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia yang mempekerjakan pekerja.

3. Salah satu dari pihak meninggal dunia Ini berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

4. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.

I. Hikmah Muzara'ah

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak punya binatang ternak dan tidak mampu menggarapnya.

Kalau dijalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan melakukan penelitian dalam lingkup masyarakat dengan objek dalam penelitian dilaksanakan di Desa Kampala dalam hal ini Masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, actual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi dari manusia dan hasil dari wawancara para human informan.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dengan asumsi dasar akan memudahkan penulis untuk memperoleh berbagai macam sumber dan referensi yang dibutuhkan guna memudahkan penulisan.

¹Burhanashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.16

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Persuasif, yaitu pendekatan yang mendatangi secara langsung Masyarakat.
- b. Pendekatan Budaya, yaitu pendekatan yang melihat sudut pandang kebudayaan yang berlaku pada masyarakat setempat.
- c. Pendekatan Sosiologis, yaitu sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

C. Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di ginakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a) Data Pustaka melalui Library research yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca beberapa literature atau bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, di antaranya adalah:

- a. Undang-undang HIR/Rbg
- b. Kompilasi Hukum Islam

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder terdiri dari:

1. Buku-buku yang berkaitandengan hukum perdata dan hukum acara perdata.
2. Literatur, dokumen, makalah-makalah, danhasilriset yang releven serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

- b) Data lapanganmelalui Field research, yaitubahanatau data yang di peroleh dari lapangan selain buku, kitab, majalah, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk perkumpulan penelitian.² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam melakukan teknik kepustakaan, penulis mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku, kitab fiqh, al-qur'an, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Adapun penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.³

b. Wawancara

Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁴ Bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten untuk memberikan informasi yaitu pimpinan yang berkaitan pada Kantor Dinas Sosial.

²Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. VII; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.54.

³Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet V, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h, 54.

⁴Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet V, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h, 58.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data lapangan adalah wawancara, dokumen, observasi, dan media elektronik seperti HandPhone (HP), Instrumen inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.⁵

⁵RiantoAdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit,2010), h.56.

BAB IV

A'bage Asse'lee Pare' Pada Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Kampala Kecamatan

Arungkeke Kabupaten Jeneponto

Kecamatan Arungkeke merupakan salah satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah 53,76 km² yang berbatasan dengan Kecamatan Batang sebelah utara, Laut Flores di sebelah timur, Kecamatan Binamu di sebelah barat, dan Laut Flores sebelah selatan. Dari delapan desa di Kecamatan Arungkeke, sebanyak tujuh desa diantaranya merupakan daerah pantai dan hanya satu desa lainnya merupakan daerah bukan pantai.

Menurut jaraknya, maka letak masing-masing Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan dan ibukota Kabupaten sangat bervariasi jarak Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan maupun ibukota Kabupaten berkisar 1-8 km. Untuk jarak terjauh adalah Desa Kalumpang Loe yaitu sekitar 9 km dari ibu kota Kecamatan (Arungkeke), sedangkan jarak terdekat Binamu.¹

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Lokasi penelitian ini dikenal dengan nama Desa Kampala salah satu lokasi ini berada di bawah wilayah Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan letak geografisnya, maka daerah ini (lokasi penelitian) sebagian besar wilayahnya berada di atas area dataran tinggi di samping sebagian

¹ Data diPeroleh Kantor Kecamatan Arungkeke

pula wilayahnya berada di dataran rendah. Berdasarkan letak wilayah Desa Kampala ini, menunjukkan Kampala merupakan salah satu Desa yang memiliki produksi pertanian yang cukup baik, terutama dari hasil tanaman jagung, padi, dan sayur-mayur. Ini disebabkan karena wilayah Desa ini umumnya daratan tinggi (bersuhu dingin).

Wilayah Desa Kampala diapit beberapa Desa yang meliputi:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulu-bulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalumpang Loe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Palajau
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Binamu

Jika dianalisis letak geografis Desa Kampala di atas, menunjukkan bahwa Desa Kampala ini memiliki Desa tetangga dan eksistensi keduanya yang cukup besar bagi perkembangan bangsa. Di samping itu, para warganya pun hidup damai berdampingan, sehingga kehidupan sosial bermasyarakat senantiasa berada pada kondisi yang aman dan sejahtera.

Desa Kampala memiliki Empat (4) dusun masing-masing dusun Monroloe, dusun Pinyang Ka'bung, dusun Kayu Buntulu dan, dusun Kalukuang dengan penduduk yang terbesar ada pada dusun Kalukuang yakni berkisar pada 833 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah dusun Pinyang Ka'bung yakni berkisar pada 514 jiwa. Adapun persebaran penduduk Desa Kampala ke dalam masing-masing dusun dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

TABEL 1

Penduduk Tiap Dusun di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke
Kabupaten Jeneponto Tahun 2013

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	MONROLOE	374	355	729
2	P. KA'BUNG	253	251	504
3	BUNTULU	288	280	568
4	KALUKUANG	401	432	833
Jumlah		1.316	1.318	2.634

Sumber Data: Diolah dari Kantor Desa Kampala

b. Agama dan Sosial Kehidupan

Masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang majemuk terdiri empat suku bangsa utama, yaitu suku bangsa Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Tiap suku bangsa tersebut mempunyai latar belakang sosial budaya dan wilayah penyebaran masing-masing yang unik dan spesifik.

Suku bangsa Makassar sejak lama menata dasar-dasar kehidupan sosial budaya dalam berbagai satuan pemukiman yang menyebar di sepanjang pesisir pantai selat Makassar, mulai dari daerah Maros sampai ke Ujung Pandang (kini Makassar), Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng. Pada zaman yang lampau

masyarakat Jeneponto pada umumnya, khususnya di Desa Kampala telah menata tempat tinggal mereka di atas rumah-rumah berbentuk panggung.²

Sebagai suatu komunitas, masyarakat hidup dalam kebersamaan menjadi kodrat baginya untuk hidup dengan membutuhkan manusia lain. Ia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat perlu untuk disosialisasikan sistem kehidupan sosial. Manusia adalah “makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari”.³ Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia harus selalu berhubungan dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan kelompok, sehingga tercipta interaksi sosial.

Umumnya masyarakat di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto adalah penganut agama Islam yang taat. Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat sifat-sifat keislamannya, mereka rajin sembahyang dan berpuasa di bulan Ramadhan. Mereka benar-benar patuh kepada ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh tokoh-tokoh agama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari data dokumentasi, terdapat beberapa masjid dan tempat-tempat peribadatan lainnya, yang selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

² Syamsul Bahri, dalam “*Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Dirjen Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1996/1997), h. 123.

³ Sarlito Wirawan Sawono, *Pengantar Umum Psikologi* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 95.

Tabel 2

Sarana Ibadah Desa Kampala

No	Dusun	Sarana Ibadah Yang Ada (Masjid)	Jumlah
1	MONROLOE	1	1
2	P. KA'BUNG	1	1
3	BUNTULU	1	1
4	KALUKUANG	1	1
Jumlah		4	4

c. Jenis-jenis Bagi Hasil di Desa Kampala

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rasyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim, terutama di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Sifat dan sistem pengolahan lahan seperti yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah Saw. sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak.

Sistem bagi hasil seperti itu, tampaknya telah dipraktekkan pula oleh sebagian masyarakat muslim di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Menurut Ramli Nur mengatakan bahwa:

“Inne pangngadakkang ni gaukkanga ri desa Kampala singkamma tongi pa'bageang asseleka ri jamanna na'bia iaminjo patanna butta ni passingkamma tongi rua tau na tena ka salanna ri para tau anjamayya, na tena nia' ka salang na panggaukang sala ri boko battu ri patanna butta.”

“Proses Adat Tersebut di laksanakan sebagaimana Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh sebagian masyarakat petani di Kampala ini mirip (kalau tidak dikatakan sama) dengan sistem kerjasama pada zaman Nabi atau sahabat, yaitu pemilik tanah dan petani diibaratkan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap mitranya.”

Kesimpulan dari peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak Ramli Nur bahwa apa yang Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh sebagian masyarakat petani di Kampala ini mirip (kalau tidak dikatakan sama) dengan sistem kerjasama pada zaman Nabi atau sahabat, yaitu pemilik tanah dan petani diibaratkan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap mitranya. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha (kegiatan) pertanian.⁴

Proses pembagian hasil pertanian sebagai hasil garapan yang dilakukan oleh petani penggarap (bukan pemilik lahan) khususnya di Desa Kampala dilakukan dengan beberapa jenis. Menurut Japa Dg.Nompo mengatakan bahwa:

⁴ Ramli Nur, pemilik lahan, *Wawancara* di Dusun Kalukuang Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 15 Januari 2019.

“Inne pa’bageang assele parea nia angguppa sitangnga areka bage ruanna nia’ angguppa bage talluna nia todo’ angguppa bage appa’na na assala’ singkamma ji janji jokala le’baka na bayu riyoloanganna.”

“Proses pembagian hasil pertanian atau hasil produksi dilakukan sistem pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi”.

Kesimpulan Peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak Japa Dg.Nompo hasil pertanian atau hasil produksi dilakukan sistem pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi”.⁵ Adapun yang dimaksud dengan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah pembagiannya dilakukan dengan cara bagi hasil, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk petani penggarap dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk pemilik lahan. Sedangkan sistem bagi hasil yang menerapkan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) proses pembagiannya mengacu pada $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk petani pengelola dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk pemilik lahan. Kesemua sistem pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap maupun sipemilik lahan.

Biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan kebun yang diolah atau digarap petani bergantung pada kesepakatan kedua pihak dengan mengikuti sistem pembagian hasil produksi pertanian.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ramli Nur mengatakan bahwa:

“Biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan kebun yang diolah atau digarap petani bergantung pada kesepakatan kedua pihak dengan mengikuti sistem pembagian hasil produksi pertanian. Jika sistem pembagian hasil dilakukan $\frac{1}{2}$ (seperdua), maka biaya yang digunakan

⁵ Japa Dg.Nompo, petani penggarap, *Wawancara* di Dusun Kalukuang Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 16 Januari 2019.

dalam pengolahan tanah ditanggung pemilik tanah. Hasil produksinya dibagi setelah dikeluarkan total biaya yang telah digunakan selama proses kerja berlangsung. Di samping ketiga sistem pembagian hasil tersebut, ada juga sistem lain yang kerap diterapkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Jeneponto yang meliputi Desa Kampala yakni sistem “*tesang*”.⁶”

Kesimpulan Peneliti dari hasil wawancara Sistem ini diterapkan oleh pemilik lahan kepada pengelola lahan (petani penggarap). Misalnya si A memberikan lahannya kepada si B untuk digarap kemudian hasilnya dibagi bersama karena biayanya sementara si A sendiri tidak punya biaya untuk lahannya itu. Kemudian menghubungi si B untuk meminjam dana dengan perjanjian selama dana yang diambil dari si B belum dibayar sejumlah yang dipinjam, maka si B tetap diberikan hasil bumi sebanyak $\frac{1}{2}$ dari hasil produksi yang dihasilkan lahan tersebut. Sistem ini berakhir setelah si A mengembalikan dana si B yang telah dipinjam.

Sedangkan menurut Jafa Dg. Nompo mengatakan bahwa:

“Inne’ pa’bagean Asse’lee Pare ri Desa Kampala assingkammai batena panggadeanga areka singkammai punna nia’ ni balli nia’ wattu le’ba’ memang ni sareangi.”

“Proses bagi hasil yang juga sering diterapkan oleh para petani di Desa Kampala ini adalah sistem penggadaian (sistem pembelian dengan jangka waktu tertentu), misalnya si A punya lahan kosong yang senantiasa berproduksi dan suatu ketika si A membutuhkan dana yang cukup besar, maka si A menggadaikan lahan kosong itu kepada kerabatnya si B dengan ketentuan (perjanjian) satu atau dua tahun. Si A tidak berhak mengambil hasil selama tenggang waktu satu atau dua tahun. Oleh karena itu, hasil

⁶ Ramli Nur, pemilik lahan, *Wawancara* di Dusun Kalukuang Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 15 Januari 2019.

produksi selama pinjaman belum lunas dinikmati oleh si B (yang punya dana)”.”⁷

Apabila dikemudian hari yakni telah tiba waktu pengembalian dana satu atau dua tahun dan ternyata si A belum sanggup membayar pengambilannya, maka dengan cara bijaksana kedua belah pihak dapat bermusyawarah untuk melanjutkan atau memperpanjang kontraknya dan hal ini dapat dilakukan hingga tiga kali perpanjangan. Tetapi jika telah sampai tiga kali perpanjangan, pun si A tetap tidak sanggup mengembalikan pinjamannya, maka lahan tersebut dimiliki mutlak oleh pemodal (si B).

Proses kerja sama yang sedang dipraktekkan para petani penggarap dan pemilik lahan serta sistem kontrak atau penggadaian sebagaimana yang dikemukakan di atas, memberikan suatu kontribusi atas perkembangan ekonomi masyarakat petani di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan salah satu hadis Rasulullah Saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dikutip oleh Afzalur Rahman sebagai berikut:

فَإِنْ أَبَى أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا (رواه البخارى)

Artinya :

“Apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan cuma-cuma atau membiarkan terbengkalai (tidak terolah), lebih baik kamu menyerahkannya untuk diolah yang ditukar dengan sewa tetap (bagi hasil).⁸

⁷ Japa Dg.Nompo, petani penggarap, *Wawancara* di Dusun Kalukuang Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 16 Januari 2019.

⁸ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 268.

Pemberian tanah berdasarkan persewaan dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu amal shaleh. Alternatif ini merupakan salah satu pilihan yang dianggap tepat untuk secara tidak langsung membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup kedua belah pihak, daripada tanah milik itu terbengkalai begitu saja.

Bertolak dari kutipan hadis tersebut penulis memandang bahwa proses bagi hasil atas produksi hasil pertanian yang kini sedang dan tengah dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto menunjukkan adanya relevansi yang signifikan. Artinya bahwa sistem bagi hasil bagi petani di Desa Kampala setidaknya dapat dikatakan memiliki landasan atau dasar operasional berdasarkan konteks hadis di atas.

Dalam kerangka peningkatan atau pembagian ekonomi secara merata antara masyarakat muslim diharapkan tumbuhnya sistem gotong royong atau tolong menolong dan kerjasama dalam berbagai hal yang positif termasuk sistem pertanian dengan sistem bagi hasil. Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil.

Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak menghasilkan sama sekali.

B. Proses Pelaksanaan Sistem *A'bage Assele* Menurut Syari'at Pada Masyarakat Desa Kampala

Islam adalah agama, pedoman bagi seluruh umat manusia, universal, meliputi seluruh aspek kehidupan sesuai untuk segala zaman dan tempat. Di samping itu, agama juga mengajak kepada kesempurnaan hidup lahir dan batin, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Umat muslim sebagai khalifah di bumi ini wajib mengamalkan ajaran Islam dalam tingkah laku konkrit, nyata yakni amalan shalih ke dalam berbagai sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi.

Semua sub sektor ekonomi misalnya pemasaran dan konsumsi, produksi, industri dan jasa, termasuk pula produksi pertanian harus berpedoman pada asas dan peraturan Alqur'an dan hadis. Begitu pula kelembagaan ekonominya dan pelaku ekonominya termasuk dalam hal ini pemilik tanah dan petani penggarap harus bertolak dari nilai-nilai Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat. Oleh karena itu, penerapan sistem bagi hasil dalam sistem pertanian (pengolahan kebun) harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada asas Islami.

Implementasi dan pelaksanaan sistem bagi hasil sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, merupakan sistem bagi hasil yang memungkinkan terhindar dari terjadinya perselisihan. Hal itu disebabkan karena sebelum terjadi kerjasama terlebih dahulu mereka mengadakan perjanjian di antara keduanya, hanya saja

karena perjanjian tersebut sebagian dari mereka ada yang masih bersifat lisan dan ada pula yang sudah tertulis.

Bagi mereka yang perjanjiannya bersifat lisan, Menurut Jaho' dilakukan atas saling kepercayaan antara satu sama lain.⁹

Terjadinya perselisihan pada kegiatan pertanian khususnya bagi petani penggarap dan pemilik kebun, pada umumnya disebabkan atas adanya tidak percaya pada petani penggarap terutama berkenaan dengan biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan lahan serta hasil produksi yang diperoleh dalam setiap kali panen sehingga timbul kecurigaan pada diri petani penggarap.

Argumentasi di atas menunjukkan betapa pentingnya rasa saling percaya mempercayai antara petani penggarap dan pemilik lahan atau kebun. Salah satu cara untuk menciptakan terjadinya saling kepercayaan adalah membuat perjanjian (sebaiknya tertulis) disertai dengan saksi-saksi dengan mengikut sertakan sistem pembagian hasil produksi. Praktek pembagian hasil produksi pertanian ini, telah lama dipraktekkan oleh masyarakat muslim di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto.

“Para pemilik lahan atau kebun yang mempekerjakan orang lain (petani penggarap) menurut Baharuddin pemilik lahan ketika dikonfirmasi penulis di Dusun Kalukuang bahwa “rata-rata mereka menerapkan sistem bagi hasil yakni sepertiga untuk pemilik dan dua pertiga untuk petani penggarap”.¹⁰ Demikian pula di Dusun Kalukuang, menurut Ganing ketika

⁹ Jaho', Petani Penggarap, *Wawancara* di Dusun Kalukuang Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 20 Januari 2019.

¹⁰ Baharuddin, Pemilik Lahan, *Wawancara* di Dusun Kalukuang Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 21 Januari 2019.

dikonfirmasi penulis mengemukakan bahwa “saya sebagai petani penggarap senang atas sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan atau kebun yang saya garap, yakni sepertiga untuk pemilik dan dua pertiga untuk penggarap.”¹¹

Bentuk penerapan sistem bagi dalam syari’at Islam secara jelas dan nyata tidak ditemukan.

“Sebagaimana Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis mengemukakan bahwa “menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil dalam ketentuan syari’at Islam tidak ditemukan petunjuk yang jelas”.”¹²

Pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu ataupun lebih rendah dari kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah), sebagaimana yang diterapkan oleh para pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap di Desa Kampala selama perjanjian dan kerjasama mereka tidak menimbulkan perselisihan di antara keduanya maka penulis cenderung memandang bahwa hal itu sejalan dengan syari’at Islam.

Sistem bagi hasil jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan atau kebun maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan ukhuwah di antara mereka.

¹¹ Siko’, petani penggarap, *Wawancara*, di Dusun Kalukuang Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 22 Januari 2019.

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 63-64.

Dalam ajaran Alqur'an upaya menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun kepada orang lain diolah dan digarap dalam hemat penulis juga termasuk salahbentuk menafkahkan harta kepada orang lain. Salah satu dalil yang menunjang tentang tidak adanya bentuk yang jelas atas membelanjakan sebagian harta.

Allah berfirman dalam QS Ali Imran /3 : 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.¹³

Di ayat lain disebutkan bahwa Allah berfirman dalam QS Al' Baqarah/2: 148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيًا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Terjemahnya:

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI., *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 91.

¹⁴ Departemen Agama RI., *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 38.

Bertolak dari kedua firman Allah di atas, menggambarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk menafkahkan sebagian harta sekaligus berlomba dalam mencari keridhaan dan kebaikan adalah mempekerjakan orang lain, termasuk dalam pengolahan lahan atau kebun. Sebab bagi mereka bekerja sebagai bertani walaupun lahannya milik orang lain, merupakan suatu pekerjaan mulia. Dan berkebun jauh lebih baik dari pada mencuri atau meminta-minta seperti yang terjadi di kota-kota.

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh para pemilik lahan terhadap petani penggarap di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto seperti sepertiga untuk pemilik lahan atau tanah dan dua pertiga untuk penggarap, atau sebaliknya sepertiga untuk penggarap dan dua pertiga untuk pemilik lahan atau tanah. Persetujuan ini mereka terapkan sesuai dengan persepakatannya pula. Menurut R.Dg. Ropong selaku pemilik kebun mengatakan:

“Punna’ ero’ki modala’ injo patanna koko a’modali’i, jari jokala minjo assele’na ni bage tallu joka patanna galung angguppai bage tallu na jokala pajamayya areka kabalikanna jokala ansareai modala”

“Jika seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses pengolahan kebun ditanggung oleh pemilik kebun, maka pembagian dilakukan dua pertiga untuk pemilik lahan dan sepertiga untuk penggarap, tetapi sebaliknya jika seluruh biaya pengurusan lahan ditanggung oleh petani penggarap maka pembagian hasil produksinya dua pertiga untuk petani penggarap dan sepertiga untuk pemilik lahan”.¹⁵

Dari keterangan informan di atas menunjukkan bahwa bentuk pengolahan semacam itu merupakan suatu cara menumbuhkan kebajikan dan rasa simpati di

¹⁵ R.Dg. Ropong, pemilik kebun, *Wawancara*, di Dusun Kalukuang Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 24 Januari 2019.

hati manusia. Kenyataan diakui bahwa tindakan yang paling baik yaitu dengan murah hati dan penuh kedermawanan memberikan kelebihan tanah yang dimilikinya untuk digarap orang lain. Dengan demikian, sistem bagi hasil di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, sebagaimana yang dipraktekkan selama ini dapat dikategorikan sebagai suatu sistem yang dapat menguntungkan satu sama lainnya.

Berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, mengorbankan sesuatu yang paling dicintai seseorang bahkan sesuatu yang paling mahal sekalipun sebagai wujud perbuatan atau amal dan memperluas tali silaturahmi. Singkatnya, sikap semacam itu tumbuh di kalangan masyarakat sehingga mereka senantiasa bersedia melakukan kebaikan-kebaikan bahkan mungkin berkorban untuk orang lain jika dibutuhkan.

Jadi sistem bagi hasil yang merupakan suatu jenis perjanjian dimana petani menerima tanah berdasarkan sistem bagi hasil, pemilik tanah membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil produksi. Demikian pula petani membayar sewa kepada pemilik tanah dalam bentuk hasil produksi. Jika terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian ini dan tidak semata-mata hanya berharap menerima bagian atas tanahnya atau tenaga yang dikeluarkannya, maka penulis melihatnya sebagai bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling baik. Akan tetapi jika sebaliknya, semangat seperti itu kurang atau lemah serta petani yang tidak berdaya menjadi alat penindasan dan eksploitasi dari pemilik tanah, atau adanya ketakutan terhadap ketidakjujuran

berbagai pihak atau terdapat kemungkinga perselisihan-perselisihan di antara mereka, maka bentuk semacam inilah yang sangat dilarang oleh syari'at Islam.

Namun demikian, sistem seperti itu yakni yang dapat menimbulkan penindasan dan eksploitasi, kebohongan dan ketidakjujuran antara petani penggarap dan pemilik tanah di Desa Kampala, hingga kini belum pernah terdengar terjadi di kalangan masyarakat pemilik tanah dan petani penggarap. Oleh karena itu, dalam hemat penulis penerapan sistem bagi hasil di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto sejalan dengan syari'at Islam.

C. Dampak Pembagian *A'bage Asse'lee* di Desa Kampala

Meskipun produksi pertanian dalam zaman modern ini telah beralih menjadi satu industri. Masih terdapat sejumlah literatur hukum tentang prinsip-prinsip dan hukum kemitraan usaha dan hubungan kerjasama sama, dalam pembagian hasil pertanian, antara pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap dalam perusahaan-perusahaan pertanian. Sistem bagi hasil antara kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan petani penggarap yang di dalamnya terdapat perjanjian bagi hasil secara adil menurut kesepakatan bersama antara petani penggarap dan pemilik kebun.

Apabila seorang pemilik lahan bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan seorang mitra usaha pekerja yakni petani penggarap, maka hendaknya diawali perjanjian yang dengan perjanjian itu keduanya dapat terhindar dari perselisihan. Hal ini sangat urgen dilakukan oleh pihak pengelola

lahan dan pemilik lahan demi menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi. Pada dasarnya, petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain disebabkan dua hal, yakni pertama memiliki lahan tetapi belum mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan kedua adalah karena memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki lapangan pekerjaan lain (keterampilan) selain bertani. Oleh karenanya, mereka inilah mengadakan negosiasi dengan tentangnya yang memiliki kelebihan lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, lalu kemudian diolahnya dengan sistem bagi hasil.

Aktivitas pertanian mereka lakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarganya. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan sama sekali, tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup keluarga tetapi memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai hamba yang lahir tanpa bekal apa-apa kecuali akal, dalam memenuhi kelangsungan hidup dan masa depan sudah barang tentu tidak terlepas dari upaya memanfaatkan akal pikiran guna mencari suatu alternatif untuk memiliki rutinitas dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup. Termasuk petani penggarap dalam komunitas petani khususnya di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto memberi arti penting tidak hanya bagi dirinya sendiri. Tetapi juga terhadap pemilik lahan atau kebun yang diuntungkan oleh produktifitas lahan tidurnya.

Manfaat yang diperoleh petani penggarap diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapat keuntungan ganda dari produksi lahannya, yakni di samping memberikan penghasilan tambahan,

juga melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.

Menurut Rustam Dg Lili ketika dikonfirmasi penulis mengatakan bahwa:

“Na ia minjo dampa’na jekala bage asseleka mange ri pajama parea inne mi ku kasia’ naiki pangngaselang na bijang-bijangku. Na saba’ najamai galung na manna na si’dija na guppa na todo’ pole assele’ battua ri galung na palaka ri bijanna ka tena mangkaja na jamai jari bajikkangngangi punna ku palaki ku jama tapi ni pake minjo sistem bage asseleka na ia pi njo le’ba’pi ni passulu’ modala’ jokala pangngurusang galunga”.

“Dampak bagi hasil terhadap aspek ekonomi petani penggarap seperti saya rasakan selama ini dapat meningkatkan pendapatan atau penghasilan keluarga, sebab di samping menggarap milik sendiri karena ada sedikit, saya juga meminta lahan orang atau teman untuk digarap karena lahan tersebut kebetulan tidak terurus (tidur). Daripada lahannya tidak berproduksi mendingan saya yang garap kemudian produksinya nanti diterapkan sistem bagi hasil setelah dikeluarkan biaya yang dibutuhkan dalam proses pengolahan kebun”.¹⁶

Jadi menurut Kesimpulan Peneliti Dampak bagi hasil terhadap aspek ekonomi Petani Penggarap itu meningkatkan Pendapatan mereka.

Hal senada diungkapkan oleh Bacing’ seorang petani penggarap di Dusun Kalukuang bahwa

“Dampak bagi hasil terhadap aspek ekonomi petani penggarap, Kita ini sebagai petani penggarap yang mengelola kebun orang lain dengan harapan menapatkan bagian dari hasil produksi lahan yang dikelola setelah dikeluarkan seluruh biaya yang dibutuhkan selama pengelolaan kebun. Karena biaya yang dibutuhkan itu seluruhnya ditanggung oleh pemilik tanah, sebab saya termasuk berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, jika telah sampai panen pemilik lahan yang membagi dua untuk pemilik dan satu untuk saya. Tetapi karena pemilik lahan termasuk orang yang mampu dan suka bersedekah, biasa juga hasil produksi kebunnya lebih banyak dia berikan kepada saya. Karena itu, saya betul-betul garap kebun tersebut secara baik dan seperti milik sendiri”.¹⁷

¹⁶ Rustam Dg Lili, petani penggarap, *Wawancara*, di Dusun Kalukuang Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 25 Januari 2019.

¹⁷ Bacing, petani penggarap, *Wawancara*, di Dusun Kalukuang Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 27 Januari 2019

Jadi menurut Kesimpulan Peneliti Dampak bagi hasil terhadap aspek ekonomi Petani Penggarap itu meningkatkan Penghasilan Keluarga.

Dari informasi yang dikemukakan Rustam Dg Lili dan Bacing di atas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan penghasilan (perekonomian) para pemilik lahan sekaligus meningkatkan pendapatan para petani penggarap.

Dalam situasi dan kondisi masyarakat khususnya masyarakat petani di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto sekarang ini, di mana pemilik lahan yang penghidupannya berada di atas garis kemiskinan (ekonomi menengah atau atas) senantiasa memperlihatkan sifat kemanusiaan.

Hal ini terbukti karena walaupun penghasilan lahannya tetap mereka ambil setelah biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan tanahnya itu, akan tetapi seringkali pula mereka memberikan berupa sedekah kepada petani yang menggarap kebunnya, sehingga penghasilan petani penggarapnya bertambah dan memotivasi untuk bekerja lebih jujur dan adil.¹⁸

Sistem pembagian bagi hasil produksi pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, tampaknya memberikan keuntungan oleh kedua pihak, karena di samping menumbuhkan rasa solidaritas, rasa saling menolong antar sesama warga desa atau masyarakat petani dan pemilik lahan dan semacamnya, juga dapat mempersubur atau meningkatkan hasil perkapita mereka. Artinya bahwa peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Kampala

¹⁸ R.Dg. Ropong, pemilik lahan, *Wawancara*, di Dusun Kalukuang Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 28 Januari 2019.

pada umumnya melalui sistem bagi hasil produksi pertanian tampaknya dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga mereka, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai lahan atau tanah.

Dengan demikian, jika diperhatikan beberapa keterangan singkat yang dikemukakan oleh petani penggarap di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak bagi hasil terhadap aspek perekonomian petani penggarap adalah berdampak positif, yakni menambah penghasilan pendapatan sekaligus dapat meningkatkan taraf perekonomian para petani penggarap, sehingga kebutuhan hidup keseharian mereka dapat terpenuhi.

D. Tinjauan hukum islam terhadap praktek sistem bagi hasil kepada petani penggarap

Dalam fiqh Islam terkenal tiga istilah dalam proses pengurusan lahan. Untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu lahan yang digarap atau diurus oleh dua orang atau lebih, sedang salah satu pihak merupakan pemilik lahan tersebut. Istilah pertama adalah sistem musaqah yakni seorang pemilik lahan menyerahkan pengurusan lahannya pada seorang petani. Kemudian hasilnya nanti dibagi dua, sebagian untuk pemilik lahan dan sebagiannya lagi untuk penggarap lahan bersangkutan.

Pemberian kebun atau lahan terhadap orang lain seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas antar sesama warga, dan menumbuhkan subur sifat

tolong- menolong di kalangan masyarakat muslim Desa Kampala, walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil.

Dalam salah satu hadis Rasulullah Saw. sebagaimana dikemukakan oleh Afzalur Rahman disebutkan bahwa:

فَأَنْ أَبَى أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً مَعْلُوماً (رواه البخارى)

Artinya :

“Apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan cuma-cuma atau membiarkan terbengkalai (tidak terolah), lebih baik kamu menyerahkannya untuk diolah yang ditukar dengan sewa tetap (bagi hasil).¹⁹

Pembagian hasil seperti itu selain diungkapkan dalam hadis di atas, juga terdapat salah satu hadis Nabi yang artinya “Rasulullah Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, kepada mereka diberikan sebagian dari hasil kebun tersebut atau sayur-mayur”.²⁰ Hadis ini memberikan kebolehan persetujuan mengingat ada pemilik kebun yang tidak punya waktu untuk menggarap kebun atau ladangnya, sedangkan sebaliknya ada pekerja yang cukup waktu luang untuk mengurus sebuah kebun tetapi ia tidak mempunyai kebun atau lahan.

Sistem kerjasama bagi hasil hendaknya dilakukan dengan cara mengadakan permufakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak yakni pihak

¹⁹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 268.

²⁰ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, h. 284.

pemilik kebun dan pihak pengelola. Hal ini sangat penting dilakukan dalam kerangka menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak yakni pertikaian atau perselisihan, walaupun perjanjian itu berupa lisan dan dianjurkan perjanjiannya itu tertulis.

Salah satu batu sandungan tidak dibolehkannya sistem kerjasama bagi hasil adalah menghindari terjadinya perselisihan, sehingga perpecahan di antara kaum muslimin dapat pecah. Karena pertimbangan itulah, sehingga “semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengganggu pihak tertentu dinyatakan tidak sah”.²¹

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya sistem bagi hasil pertanian ini adalah karena terdapat di kalangan masyarakat seorang yang memiliki lahan perkebunan, tetapi ia tidak sanggup menggarap atau mengolahnya, sehingga kebun atau lahannya tidak terurus. Sebaliknya, terdapat pula orang yang sanggup dan punya waktu luang untuk menggarap tanah, tetapi ia tidak mempunyai tanah atau lahan. Langkah ini “tidak ditemukan adanya peraturan dalam syari’ah yang melarang setiap orang untuk menanamkan modal berupa dana ataupun tenaga secara patungan untuk memulai satu kerjasama bagi hasil pertanian”,²² kecuali jika kegiatan itu menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

²¹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terjemah *Doktrin Ekonomi Islam* h. 270.

²² M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* terjemah *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 113.

Salah satu ilustrasi yang digambarkan oleh Rasulullah Saw. menunjukkan bahwa dahulu di zaman nabi ada tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani padamasa Rasul, yakni Rafi'i bin Khadij, Jabir bin Abdullah dan Thabat bin Zahhak meriwayatkan bahwasanya nabi melarang bentuk-bentuk persewaan yang dzalim.²³ Apabila sudah menyerahkan kebun atau lahannya kepada seorang petani penggarap untuk ditanaminya, dan pemilik kebun atau lahan itu menetapkan bagian yang jelas diketahui dari hasil kebun atau lahan, maka cara semacam itu tidak dibolehkan.

Secara syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani beserta para pemilik kebun atau lahan di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto tampaknya relevan dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa kebun atau lahan yang sudah tidak terurus. Dari pada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan orang lain mengurusnya dengan jaminan atau perjanjian bagi hasil.

Menurut Bahtiar bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di sini adalah,

“Jokala punna sistem bage assele’ na koperasia, massu’na jokala pata kokoa areka jokala petunia ni tantuang memang mi untung rugi na, iaminjo pa’bageanna tena na jelas tergantung battua ri bage assele’ na

²³ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terjemah *Doktrin Ekonomi Islam* h. 270.

kokongna na le'ba pi ni passulu' modala' pangngurussanna. Jari harus pi patanna koko na pajamanna assi mengerti'i kesepakatan jokala le'baka na setuju sebelumna. Jari punna salla' gagal panengi na iaminjo harus saling rela antarimai injo kagagallangna. Na punna berhasil li jokala assele' panenna ia minjo nibage assele"

"Sistem bagi hasil secara koperasi, artinya bahwa antara pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung-rugi, yakni pembagiannya tidak jelas (nyata) melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan atau kebun setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil".²⁴

Jadi menurut Kesimpulan Peneliti sistem bagi hasil secara koperasi, artinya bahwa antara pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung-rugi.

Namun bagi hasil yang dimaksudkan di sini adalah hasil produksi dari tanah atau lahan yang diurus oleh petani penggarap itu. Oleh karenanya pemilik tanah atau lahan hendaknya tidak menetapkan secara jelas bagian yang akan diambilnya kelak, sebab petani terkadang gagal panen. Penetapan jelas yang dimaksud adalah antara lain, menetapkan angka pasti 30 harus diterimanya, tetapi karena gagal panen maka hasil panennya hanya berkisar 15 karung, sementara si pemilik tidak mau tahu kegagalan panen itu. Oleh karenanya, petani penggarap itulah yang harus menutupi kekurangan panen itu.

Penetapan sistem bagi hasil secara jelas sebagaimana dikemukakan di atas, jelas dapat menimbulkan perselisihan dan dapat merugikan orang lain yakni petani penggarap. Oleh karena itu, sistem bagi hasil yang disertai dengan

²⁴ Bahtiar, Petani Penggarap, *Wawancara* di Dusun Kalukuang Desa Tanjonga Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 18 Januari 2019.

pembagian secara jelas sama sekali tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman nabi, dan karenanya dapat dikatakan bertentangan dengan syari'at Islam.

Dengan demikian, sistem bagi hasil oleh masyarakat muslim di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jenepono, dapat dikatakan sesuai dengan bagi hasil yang pernah dipraktekkan umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolaan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses Pelaksanaan Sistem *A'bage Assele* Pada Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto ada dua cara: Pertama jikalau seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses pengolahan kebun ditanggung oleh pemilik kebun, maka pembagian dilakukan dua pertiga untuk pemilik lahan dan sepertiga untuk penggarap, tetapi sebaliknya jika seluruh biaya pengurusan lahan ditanggung oleh petani penggarap maka pembagian hasil produksinya dua pertiga untuk petani penggarap dan sepertiga untuk pemilik lahan”, Kedua Penggarap dalam hal ini tidak adil, karena dari hasil Panen Penggarap mengambil 2/3 dari hasil tersebut, kemudian sisanya diberikan petani dan pemilik lahan.
2. Dampak pembagian *A'bage Assele* di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto tergantung dari Kesepakatan awal yang dibuat oleh masing-masing pihak baik penggarap maupun pemilik lahan.
3. Tinjauan hukum islam terhadap praktek sistem bagi hasil (muzara'ah) Pemberian kebun atau lahan terhadap orang lain seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas antar sesama warga, dan menumbuh suburkan sifat tolong- menolong di kalangan masyarakat muslim Desa Kampala, walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut

tidak dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

Sebagai wujud terakhir dari pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan tentang implikasi dari penelitian ini dalam bentuk saran-saran atau harapan-harapan, yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan agar skripsi ini menjadi suatu masukan kepada setiap pemilik lahan atau kebun serta kepada setiap petani penggarap, agar seyogianya sistem bagi hasil yang diterapkan senantiasa berasaskan dengan nilai-nilai Islam.
2. 2. Disarankan pula khususnya para petani penggarap agar dapat lebih meningkatkan peranannya dalam mengelola lahan atau kebun orang lain dengan tetap mengacu pada minimalisasi penggunaan dana dalam situasi dan kondisi ekonomi yang hingga kini masih krusial atau krisis, sehingga dapat terwujud prinsip pengeluaran biaya sedikit untuk menghasilkan keuntungan yang besar.
3. Diharapkan pula agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca, sehingga keberdaannya dapat menambah khasanah literatur keilmuan.
4. Disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama mereka yang lahannya tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri.

5. Diharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahma, *Economic Doctrines of Islam*, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II (Cet. III; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 260 – 621. 2009), h. 588.
- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 693
- Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 268.
- Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis besar ekonomi islam*, (edisi revisi, Yogyakarta BPFE, 1978) h.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 243
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 256.
- Bogor : Pt. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), cet, ke-3, h. 375.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 61.
- Charum Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 61.
- Departemen Agama RI., *Alqur'an dan Terjemahnya* (Semarang : Toha Putra, 1989), h. 70.
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 204
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Indonesia*, h. 287.
- Ikhwan, "Islam", *Media islam.Com*, 23 Juni 2010. <http://www.mediaislam/halal/> (18 Juli 2014).
- Jawad, Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera,
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 77.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* , h. 102 – 103.

M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* terjemah oleh *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (edisi I; Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1996), h. 8.

M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* , h. 8.

Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia FIQH Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), h. 299.

Muhammad Abdullah dan Ibrahim Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, h. 301.

Nailul Author, “Musaqah, Muzara’ah, dan Mukhabara”, *Pendidikan Islam.Com*, 06

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.279.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 279

Yusuf Qardawi, *Fiqh al – Zakat (Hukum Zakat)*, terjemah: Salman Harun (*et al*), (

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara dalam Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang *A'bage Assele* Pada Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto.

Objek penelitian :

Hari/Tanggal :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Sistem *A'bage Assele* Pada Masyarakat Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana penerapan bagi hasil (*muzara'ah*) bagi kesejahteraan petani penggarap di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem bagi hasil (*muzara'ah*) kepada petani penggarap?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA HUMAN INFORMAN

NAMA :

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

PEKERJAAN :

1. Siapa Nama Asli Anda ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui Filosofi dari adat *A'bage Assele*?
3. Kapan Adat *A'bage Assele* di laksanakan?
4. Bagaimana proses Adat tersebut di laksanakan?
5. Apakah Bapak/ibu juga melaksanakan adat tersebut?
6. Ketika Adat itu di laksanakan, apakah menurut Bapak sesuai ajaran Islam?

7. Sudah Berapa Lama Adat ini dilaksanakan di daerah Bapak/ibu?
8. Ketika melakukan Perjanjian di awal, Apakah biasa ada wanprestasi dalam perjanjian itu?
9. Apa dampak Positif bagi masyarakat dari pelaksanaan Adat *A'bageAssele*?
10. Apa Saja syarat dan ketentuan dari pelaksanaa Adat *A'bageAssele*?

Nomor : B- 306 /SH.01/PP.00.9/01/2019

Samata Gowa 16 Januari 2019

Sifat : Penting
Lamp : Proposal
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2t, BKPM D Prov. Sulsel
di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Marwati
Nim	: 10100115088
Fakultas/jurusan	: Syariah Dan Hukum / HAPK
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Samata

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan judul skripsi :

"Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem A'bage Assu'lee Pare' pada Masyarakat di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto"

Dosen Pembimbing :
1. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.
2. Dra. Hj. Hartini, M.H.I.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian di **Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto**, terhitung mulai tanggal 15 Januari 2019 s.d. 15 Februari 2019. Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 10131/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Jeneponto

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-306/SH.01/PP.00.9/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MARWATI**
Nomor Pokok : 10100115088
Program Studi : HAPK
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM A"BAGE ASSE"LEE PARE" PADA MASYARAKAT DI
DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 Januari s/d 15 Februari 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 Januari 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Paringgal



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN ARUNGKEKE
DESA KAMPALA

Jl. Poros Dusun Buntulu Desa Kampala Kec. Arungkeke

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 023/ DKP/ II/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten menerangkan bahwa :

Nama : MARWATI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat /Tgl Lahir : Kalukuang, 24 Maret 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Lembaga : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Program Studi : HAPK (Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan)
Alamat : Dusun Kalukuang Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto.

Bahwa yang tersebut namanya di atas benar-benar telah melakukan penelitian tentang **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem A'bage Assele Pare Pada Masyarakat Desa Kampala Kec.Arngkeke Kab.Jeneponto"** di wilayah Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, selama 30 hari mulai dari tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2019.

Demikian surat keterangan ini, kami buat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kampala, 01 Februari 2019.

Mengetahui :
Kepala Desa Kampala
(Sekdes)



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Petani di desa Arungkeke Kabupaten Jeneponto



Wawancara dengan Petani di desa Arungkeke Kabupaten Jeneponto



Petani yang sedang memupuk sawah



Panen hasil padi



Panen hasil padi



Mengangkat hasil Panen padi



Wawancara dengan pegawai kelurahan



Wawancara dengan Sekertaris Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM *A’BAGE ASSE’LEE PARE’* PADA MASYARAKAT DI DESA KAMPALA KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO”** bernama lengkap Marwati, Nim : 10100115088, Anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Maji dan Ibu Mancio yang lahir pada tanggal 24 Maret 1996 di Kalukuang, Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Inpres 107 Buntulu Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto pada tahun 2004-2009 Sampai, Penulis menempuh pendidikan di MTS Mannilingi Bulu-bulo , di tahun 2009-2012, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1 Jeneponto tahun 2012-2015. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Mandiri (UMM) dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan hingga tahun 2019.